

RANCANG BANGUN MODEL MANAJEMEN PENANGANAN KONFLIK PERTANAHAN

AGUSTIN ITERSON SAMOSIR



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAN BISNIS
SEKOLAH BISNIS
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026**



@Hak cipta milik IPB University

IPB University



IPB University
Bogor Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Perpustakaan IPB University

PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi dengan judul “Rancang Bangun Model Manajemen Penanganan Konflik Pertanahan” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juli 2026

Agustin Iterson Samosir
K1601202054



RINGKASAN

AGUSTIN ITERSON SAMOSIR. Rancang Bangun Model Manajemen Penanganan Konflik Pertanahan. Dibimbing oleh BUDI MULYANTO, NOER AZAM ACHSANI dan ARIF IMAM SUROSO.

Tingginya konflik pertanahan di Indonesia menunjukkan bahwa mekanisme penanganan yang tersedia belum mampu menyelesaikan akar masalah secara tuntas dan berkelanjutan. Penanganan konflik selama ini masih dominan pada pendekatan yuridis/litigasi yang cenderung kaku, mahal, lama, dan sering menghasilkan pola menang-kalah. Meskipun Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 telah mengatur penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan melalui pendekatan non-litigasi, implementasinya belum didukung prosedur baku, *standard operating procedure* (SOP), maupun model manajemen yang seragam. Akibatnya, proses penanganan konflik masih sangat bergantung pada diskresi tim yang ditunjuk, terutama dalam menentukan subjek, objek, serta hubungan historis antara subjek dan objek konflik. Padahal, ketiga unsur tersebut harus diverifikasi melalui bukti dan data yang akurat.

Penelitian ini menawarkan model manajemen penanganan konflik pertanahan berbasis data generik, yaitu data Dukcapil untuk verifikasi subjek dan data Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk validasi objek. Data Dukcapil memiliki legitimasi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sedangkan RTRW menjadi acuan legal-spasial dalam menentukan zonasi dan fungsi ruang. Integrasi kedua data ini diharapkan meningkatkan akurasi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penanganan konflik pertanahan.

Penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis tata cara penyelesaian konflik pertanahan oleh Kementerian ATR/BPN; memetakan regulasi penanganan konflik terhadap permasalahan berbasis data generik; mengembangkan model konseptual manajemen penanganan konflik pertanahan; serta merancang strategi prioritas penerapan model. Kebaruan penelitian terletak pada penguatan konseptual, metodologis, kontekstual, dan luaran kebijakan. Secara konseptual, penelitian memperkenalkan verifikasi berbasis data generik. Secara metodologis, penelitian mengintegrasikan POAC, Soft Systems Methodology (SSM), dan Analytical Hierarchy Process (AHP). Secara kontekstual, model diuji di Provinsi Jambi sebagai prototipe yang dapat direplikasi secara nasional. Pada level luaran, penelitian menghasilkan *policy tool* berupa rekomendasi tata kelola pertanahan yang partisipatif dan berbasis bukti.

Metode penelitian dilakukan melalui empat tahapan. Pertama, analisis tata cara penyelesaian konflik pertanahan di Kementerian ATR/BPN menggunakan data primer dan sekunder. Kedua, pemetaan regulasi sebagai dasar perancangan model. Ketiga, pengembangan model konseptual melalui wawancara, FGD, kuesioner, observasi, dan analisis *soft system methodology* (SSM) untuk menghasilkan *rich picture* serta model konseptual. Keempat, perumusan strategi prioritas menggunakan *analytical herarchy process* (AHP).

Hasil penelitian menunjukkan perlunya transformasi paradigma dari pendekatan litigasi menuju manajemen non-litigasi berbasis data. Kasus di Provinsi Jambi memperlihatkan bahwa konflik dominan antara korporasi dan masyarakat



dapat diredam melalui mediasi berbasis data yang lebih efektif dalam menciptakan harmoni sosial dan kepastian investasi. Peta RTRW terbukti menjadi instrumen valid untuk menentukan objek, sedangkan data Dukcapil menjadi dasar akurat untuk memverifikasi subjek. Integrasi keduanya mampu mengurangi manipulasi klaim sepihak dan mempercepat penyelesaian konflik. Model yang dikembangkan mengintegrasikan POAC dengan SSM sehingga menghasilkan kerangka kerja yang sistematis, adaptif, dan operasional. Berdasarkan hasil AHP, *Model Hybrid Institusional* atau Multi-Aktor ditetapkan sebagai skenario terbaik karena mensinergikan otoritas negara, kearifan lokal/adat, dan kepastian data generik. Model ini dapat direplikasi di berbagai wilayah Indonesia untuk mendukung tertib agraria yang berkelanjutan.

Kata kunci: *analytical hierarchy process*, data generik, konflik pertanahan, *model hybrid institusional*, *soft systems methodology*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



SUMMARY

AGUSTIN ITERSON SAMOSIR. Design and Build a Land Conflict Management Model. Supervised by BUDI MULYANTO, NOER AZAM ACHSANI and ARIF IMAM SUROSO.

The high incidence of land conflicts in Indonesia indicates that existing conflict-handling mechanisms have not yet been able to address the root causes of disputes in a comprehensive and sustainable manner. To date, land conflict resolution has largely relied on juridical or litigation-oriented approaches, which tend to be rigid, costly, time-consuming, and often produce win-lose outcomes. Although Ministerial Regulation of ATR/BPN No. 21 of 2020 provides a framework for handling and resolving land cases through non-litigation mechanisms, its implementation has not yet been supported by a standardized procedure, standard operating procedure (SOP), or uniform management model. Consequently, the handling of land conflicts remains highly dependent on the discretion of appointed teams, particularly in determining the disputing subjects, the disputed objects, and the historical relationship between them. These three elements should, however, be verified through accurate evidence and reliable data.

This study proposes a generic data based land conflict management model, in which population and civil registration data from Dukcapil are used to verify the disputing subjects, while Regional Spatial Plan (RTRW) data are used to validate the disputed objects. Dukcapil data have legal legitimacy under Law No. 23 of 2006 on Population Administration, as amended by Law No. 24 of 2013, whereas RTRW serves as a legal-spatial reference for determining zoning and spatial functions. The integration of these two data sources is expected to improve the accuracy, efficiency, effectiveness, and accountability of land conflict management.

This research aims to: analyze the procedures for resolving land conflicts by the Ministry of ATR/BPN; map the regulatory framework for land conflict handling in relation to problems arising from generic-data-based case resolution; develop a conceptual model for land conflict management; and formulate priority strategies for implementing the model. The novelty of this research lies in its conceptual, methodological, contextual, and policy-output contributions. Conceptually, the study introduces generic-data-based verification. Methodologically, it integrates the POAC framework, Soft Systems Methodology (SSM), and the Analytical Hierarchy Process (AHP). Contextually, the model is tested in Jambi Province as a prototype for national replication. At the policy-output level, the study produces a policy tool in the form of governance recommendations for a more participatory and evidence-based land administration system.

The research was conducted through four stages. First, it analyzed existing procedures for land conflict resolution within the Ministry of ATR/BPN using primary and secondary data. Second, it mapped relevant regulations as the basis for model development. Third, it developed a conceptual model through interviews, focus group discussions, questionnaires, observation, and SSM analysis, resulting in a rich picture and conceptual model. Fourth, it formulated priority implementation strategies using AHP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

IPB University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



@Hak cipta milik IPB University

IPB University

The findings indicate the need for a paradigm shift from litigation-oriented approaches toward data-driven non-litigation management. Evidence from Jambi Province shows that dominant conflicts between corporations and communities can be mitigated through data-based mediation, which is more effective in fostering social harmony and investment certainty. RTRW maps are proven to be valid instruments for determining disputed objects, while Dukcapil data provide the most accurate basis for verifying disputing subjects. The integration of both data sources can reduce unilateral claim manipulation and accelerate conflict resolution.

The proposed model integrates POAC and SSM to produce a systematic, adaptive, and operational framework. Based on the AHP results, the Hybrid Institutional or Multi-Actor Model is identified as the best scenario because it synergizes state authority, local or customary wisdom, and generic-data certainty. This model can be replicated across various regions in Indonesia to support sustainable agrarian order.

Keywords: analytical hierarchy process; generic data; hybrid institutional model, land conflict; soft systems methodology.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2026
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.

RANCANG BANGUN MODEL MANAJEMEN PENANGANAN KONFLIK PERTANAHAN

AGUSTIN ITERSON SAMOSIR

Disertasi
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Doktor pada
Program Studi Doktor Manajemen Bisnis

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAN BISNIS
SEKOLAH BISNIS
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026**



@Hak cipta milik IPB University

IPB University

Penguji Luar Komisi Pembimbing pada Ujian Tertutup Disertasi:

1. Prof. Dr. Ir. Harianto, M.S.
2. Prof. Ir. Trias Aditya Kurniawan Muhammad , S.T., M.Sc., Ph.D., I.P.U.

Promotor Luar Komisi Pembimbing pada Sidang Promosi Terbuka Disertasi:

1. Prof. Dr. Ir. Harianto, M.S.
2. Prof. Ir. Trias Aditya Kurniawan Muhammad , S.T., M.Sc., Ph.D., I.P.U.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

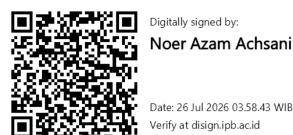
Judul Disertasi : Rancang Bangun Model Manajemen Penanganan Konflik Pertanahan
Nama : Agustin Iterson Samosir
NIM : K1601202054

Disetujui oleh:

Pembimbing 1:
Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto, M.S.



Pembimbing 2:
Prof. Dr. Ir. Noer Azam Achsani, M.S.



Pembimbing 3:
Prof. Dr. Ir. Arif Imam Suroso, M.Sc.

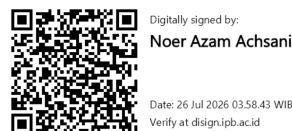


Diketahui oleh:

Ketua Program Studi Pascasarjana
Manajemen dan Bisnis:
Prof. Dr. Ir. Ujang Sumarwan, M.Sc.
NIP 196009161986011001



Dekan Sekolah Bisnis:
Prof. Dr. Ir. Noer Azam Achsani, M.S.
NIP 196812291992031016



Tanggal Sidang Tertutup: 13 Juni 2026

Tanggal Lulus:

Tanggal Sidang Promosi Terbuka: 21 Juli 2026

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya sehingga disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik. Disertasi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Manajemen dan Bisnis, Sekolah Bisnis, Institut Pertanian Bogor, dengan judul Rancang Bangun Model Manajemen Penanganan Konflik Pertanian

Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Komisi Pembimbing, yaitu Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto M.S. selaku Ketua Komisi Pembimbing, serta Prof. Dr. Ir. Arif Imam Suroso, M.Sc., dan Prof. Dr. Ir. Noer Azam Achsani M.S. selaku Anggota Komisi Pembimbing, atas bimbingan, arahan, masukan, serta dukungan yang terus menerus diberikan selama proses penyusunan disertasi ini. Juga penghormatan kepada Alm. Dr. Ir. Idqan Fahmi, M.Ec dan Alm. Prof. Dr. Ir. Lukman Mohammad Baga, M.A.E. sebagai Anggota Komisi Pembimbing diawal penelitian ini yang memberikan inspirasi dan pendampingan pemilihan, pergantian topik serta permulaan penulisan disertasi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para Penguji Luar Komisi yaitu Prof. Dr. Ir. Harianto, M.S. dan Prof. Ir. Trias Aditya, S.T., M.Sc., Ph.D., IPU., atas telaah, saran, dan koreksi yang sangat berharga dalam proses evaluasi, penguatan dan penyempurnaan disertasi ini. Penulis juga menyampaikan penghargaan kepada Dekan Sekolah Bisnis IPB University, Ketua Program Studi Pascasarjana Manajemen dan Bisnis, Prof. Dr. Ir. Ujang Sumarwan, M.Sc., serta seluruh dosen dan tenaga kependidikan di Sekolah Bisnis IPB University atas dukungan akademik, administratif, dan kelembagaan selama penulis menempuh studi doktoral.

Penghargaan penulis sampaikan kepada para responden pakar, narasumber, dan seluruh pihak yang telah membantu penyediaan data, informasi, serta berbagai masukan substantif selama proses penelitian, baik dari lingkungan Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota di Jambi, Perangkat Desa, Masyarakat Adat, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat/Civil Society, dan korporasi.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Tim peneliti dan teman-teman di Kementerian ATR/BPN serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas kebersamaan dan dukungan yang diberikan selama penyelesaian Studi ini.

Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih keluarga tercinta, Wuryanti, Ariel Winfried, Alvin Wilbert, Aurelius Walfred, atas pengertian yang tiada henti selama menjalani Studi doktoral. Dukungan moral dan spiritual dari keluarga menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan seluruh rangkaian penelitian dan penulisan disertasi ini

Penulis berharap disertasi ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen dan bisnis serta kebijakan publik khususnya dalam kajian keberlanjutan, model serta menjadi referensi bagi penyelenggara negara, akademisi, praktisi, korporasi dan pembuat kebijakan dalam mendorong praktik yang lebih bertanggung jawab, berkeadilan yang membangun masyarakat.

Bogor, Juni 2026

Agustin Iterson Samosir

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 <i>Novelty</i> Penelitian	12
1.6 Ruang Lingkup Penelitian	14
II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 <i>Grand Theory</i>	15
2.2 Kerangka Integratif Konflik Pertanahan Indonesia	21
2.3 Regulasi Konflik Pertanahan	24
2.4 Fondasi Konseptual Model Manajemen Penanganan Konflik Pertanahan	25
2.5 Penelitian Terdahulu	27
2.6 Kerangka Pemikiran	39
III METODE PENELITIAN	42
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	42
3.2 Objek Penelitian	42
3.3 Pengumpulan Data	42
3.4 Metode Analisis	43
3.5 Alur Integrasi Metodologi Penelitian: Menuju Model Manajemen Berbasis Data Generik	48
IV KONFLIK PERTANAHAN DI PROVINSI JAMBI	52
4.1 Pendahuluan	52
4.2 Pola Umum Konflik	53
4.3 Status Penyelesaian Konflik	55
4.4 Instrumen Penyelesaian	56
4.5 Faktor Risiko dan Kerawanan	57
4.6 Konflik pertanahan di berbagai wilayah Indonesia	58
4.7 Analisis Empiris Konflik Pertanahan di Provinsi Jambi: Validasi Data Generik Sebagai Instrumen Resolusi	60
4.8 Rekomendasi Strategis	61
V PETA REGULASI DAN IMPLEMENTASI TERHADAP KONFLIK PERTANAHAN DI INDONESIA	64
5.1 Pendahuluan	64
5.2 Kerangka Hukum Tingkat Undang-Undang	65
5.3 Peraturan Pemerintah (PP) Terkait dan Relevansinya	67
5.4 Peraturan Menteri (Permen) Terkait Penyelesaian Konflik Pertanahan	68
5.5 Pemetaan Regulasi dan Implikasinya terhadap Model	69



DAFTAR ISI (LANJUTAN)

VI RANCANG BANGUN MODEL KONSEPTUAL MANAJEMEN PENANGANAN KONFLIK PERTANAHAN	74
6.1 Pendahuluan	74
6.2 Tahap 1 dan 2: Identifikasi dan Strukturisasi Situasi Problematik Penanganan Konflik Pertanian.	76
6.3 Tahap 3: <i>Root Definition (RD) as Relevant System</i>	86
6.4 Tahap 4: Model Konseptual Manajemen Penanganan Konflik Pertanian	89
6.5 Tahap Kelima dan Keenam : Perbandingan Model dengan Dunia Nyata dan Aksi Perbaikan yang Diusulkan	101
VII STRATEGI PENERAPAN MODEL MANAJEMEN PENANGANAN KONFLIK PERTANAHAN	109
7.1 Hasil AHP	115
7.2 Hubungan Faktor dengan Aktor	118
7.3 Hubungan Aktor dengan Tujuan	119
7.4 Hubungan Tujuan dengan Skenario	121
7.5 Tahapan Penerapan Model Manajemen Penanganan Konflik Pertanian	122
7.6 Implikasi Manajerial	127
7.7 Implikasi terhadap Potensi Ekonomi	128
VIII SIMPULAN DAN SARAN	130
8.1 Kesimpulan	130
8.2 Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN	138
RIWAYAT HIDUP	153

@Hak cipta milik IPB University



DAFTAR TABEL

1 Kasus pertanahan di Indonesia dari tahun 2015-2026	2
2 Tipologi masalah/kasus pertanahan di Indonesia tahun 2025-2026 yang ditangani Kementerian ATR/BPN	7
3 Matriks metode penelitian	42
4 Tahapan metode SSM	44
5 Skala perbandingan berpasangan	47
6 Matriks perbandingan kriteria	48
7 Pola umum konflik pertanahan Provinsi Jambi	53
8 Tipologi kasus pertanahan di Provinsi Jambi	54
9 Status penyelesaian konflik	56
10 Instrumen yang digunakan dalam penyelesaian konflik	57
11 Penyebab utama konflik pertanahan	78
12 Rangkuman masalah dan solusi dalam konteks konflik pertanahan	84
13 Penjabaran CATWOE berdasarkan <i>root definition</i>	88
14 Perbandingan model dengan dunia nyata	101
15 Level 1 (faktor)	110
16 Level 2 (aktor)	112
17 Level 3 (tujuan strategis)	113
18 Level 4 (skenario)	114
19 Alternatif scenario penerapan model manajemen penanganan konflik pertanahan yang berbasis data generik	117
20 Hubungan faktor dengan aktor dalam penerapan model manajemen penanganan konflik pertanahan yang berbasis data generik	119
21 Hubungan aktor dengan tujuan dalam penerapan model manajemen penanganan konflik pertanahan yang berbasis data generik	121
22 Hubungan aktor dengan tujuan dalam penerapan model manajemen penanganan konflik pertanahan yang berbasis data generik	122



DAFTAR GAMBAR

1	Peta Konflik Pertanahan dari tahun 2013-2018 berdasarkan sektor	2
2	Evaluasi resolusi konflik pada 4 provinsi	3
3	Proses manajemen dalam konteks penanganan konflik pertanahan	5
4	Sepuluh provinsi Konflik Pertanahan tertinggi 2023	8
5	Gambaran umum rumusan masalah penelitian	10
6	Interkoneksi penyebab konflik pertanahan	17
7	Kerangka analisis bibliometrik	28
8	Jumlah publikasi berdasarkan tahun	28
9	Pembahasan tema konflik pertanahan berdasarkan <i>subject area</i>	29
10	Jumlah afiliasi riset berdasarkan negara	29
11	Jumlah publikasi riset dengan tema konflik pertanahan di Indonesia	30
12	<i>Network visualization</i> konflik pertanahan	31
13	<i>Network visualization</i> kata kunci <i>land conflict</i>	31
14	<i>Network visualization</i> tema <i>land conflict</i> di Indonesia	32
15	Kerangka pemikiran penelitian	41
16	Bentuk umum abstraksi sistem hirarki (hipotetik)	47
17	Tahapan dan analisis data penelitian	49
18	Alur konseptual integrasi SSM dan AHP	51
19	Peta sebaran konflik di Indonesia tahun 2024	58
20	Potret penanganan konflik pertanahan Provinsi Jambi	63
21	Peta integrasi regulasi dan implementasinya terhadap konflik pertanahan	73
22	<i>Soft System Methodology</i> (SSM)	75
23	<i>Rich Picture</i> manajemen penanganan konflik pertanahan	86
24	Model konseptual manajemen penanganan konflik pertanahan	100
25	Hierarki strategi model manajemen penanganan konflik pertanahan	114
26	Struktur hirarki hasil pengolahan AHP	116
27	Tahapan penerapan model manajemen penanganan konflik pertanahan	124

DAFTAR LAMPIRAN

1	Kuesioner Penelitian	139
---	----------------------	-----